

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Politik & Keamanan

Vol. 02, Ed. 11, Juni 2022

Reviu KEM-PPKF 2023: LPP TVRI dan LPP RRI Hal. 1

Tinjauan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II pada KEM-PPKF 2023: Kemenpan RB, LAN dan BKN Hal. 3

Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023 Hal. 5



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI



Daftar Isi

Reviu KEM-PPKF 2023: LPP TVRI dan LPP RRI.....	1
Tinjauan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II pada KEM-PPKF 2023: Kemenpan RB, LAN dan BKN.....	3
Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023	5

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Ratna Christianingrum * Ade Nurul Aida

Tio Riyono * Riza Aditya Syafri

Editor

Satrio Arga Effendi

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Kiki Zakiah * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi I

POLITIK DAN KEAMANAN

Reviu KEM-PPKF 2023: LPP TVRI dan LPP RRI

HIGHLIGHT

- Pagu indikatif lembaga LPP TVRI menurun sebesar 8,5% pada 2023. Jumlah anggaran LPP TVRI turun dari Rp1.695,8 miliar pada 2022 menjadi Rp1.552 miliar pada 2023.
- Turunnya alokasi anggaran LPP TVRI mendorong penurunan alokasi anggaran untuk program manajemen sebesar minus 2,9% atau dari Rp907,4 miliar pada pagu APBN 2022 menjadi Rp881,4 miliar pada 2023, serta pada program penyiaran publik sebesar minus 15% atau turun dari Rp788,4 miliar pada 2022 menjadi Rp670,5 miliar pada 2023.
- Pagu indikatif lembaga LPP RRI pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 26%, dari Rp1.341,8 miliar pada tahun 2022 turun menjadi Rp993 miliar di tahun 2023.
- Penurunan anggaran tersebut diikuti juga dengan penurunan anggaran pada kedua program, baik program dukungan manajemen, maupun program penyiaran publik. Kedua program tersebut turun masing-masing sebesar minus 3% dan minus 72%.

Berdasarkan Pasal 23 UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2003 bahwa APBN dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR untuk kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang. Dalam proses pembahasan anggaran bersama pemerintah dan DPR, diawali dengan siklus pembicaraan pendahuluan. Dalam siklus ini akan dibahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF). Dokumen KEM PPKF merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun mendatang. Pada edisi 11 ini, akan disajikan reviu atas pagu indikatif anggaran belanja LPP TVRI dan LPP RRI pada 2023.

Lembaga Penyiaran Publik TVRI

Pagu indikatif Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menurun sebesar 8,5% pada 2023. Jumlah anggaran LPP TVRI turun dari Rp1.695,8 miliar pada 2022 menjadi Rp1.552 miliar pada 2023. Turunnya alokasi anggaran LPP TVRI mendorong penurunan alokasi anggaran untuk program manajemen sebesar 2,9% dari Rp907,4 miliar pada pagu APBN 2022 menjadi Rp881,4 miliar pada 2023, serta penurunan pada program penyiaran publik sebesar 15% atau turun dari Rp788,4 miliar pada 2022 menjadi Rp670,5 miliar pada 2023.

Tabel 1. Pagu Indikatif LPP TVRI (dalam miliar rupiah)

Program	Pagu Indikatif 2022	APBN 2022	Pagu Indikatif 2023	Perubahan (%)
LPP TVRI	1.470,7	1.695,8	1.552,0	-8,5
Program Dukungan Manajemen	789,2	907,4	881,4	-2,9
Program Penyiaran Publik	681,5	788,4	670,5	-15,0

Sumber: KEM PPKF 2023, KEM PPKF 2022, APBN 2022, diolah

Alokasi pagu indikatif LPP TVRI masih lebih besar untuk program dukungan manajemen (56,7%) dibandingkan program penyiaran publik yang hanya 43,2%. Dari jumlah tersebut, anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1.381 miliar atau 89% dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp171,4 miliar atau 11%.

Pagu anggaran 2023 untuk kantor pusat sebesar Rp864,5 miliar dan stasiun penyiaran daerah sebesar Rp687,5 miliar. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp454,4 miliar, belanja barang operasional sebesar Rp385,4 miliar, belanja non operasional sebesar Rp401,1 miliar dan belanja modal sebesar Rp331 miliar.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna

Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Mujiburrahman, Ade Nurul Aida, dan Satrio Arga Effendi

LPP TVRI mengajukan tambahan pagu sebesar Rp500 miliar dengan rincian Rp150 miliar digunakan untuk program digitalisasi infrastruktur pemancar *Analog Switch Off*, Rp150 miliar digunakan untuk sewa satelit, *pay TV* dan peralatan pendukung TVRI *World*. Sedangkan Rp100 miliar untuk pengembangan *over the top* media baru. Sebesar Rp50 miliar untuk pembangunan kampus terpadu pusdiklat LPP TVRI dan Rp50 miliar untuk pembangunan studio dan tower TVRI Maluku Utara dan Banten.

Lembaga Penyiaran Publik RRI

Pagu indikatif Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 26%, dari Rp1.341,8 miliar pada tahun 2022 turun menjadi Rp993 miliar di tahun 2023. Penurunan anggaran tersebut diikuti juga dengan penurunan anggaran pada kedua program, baik program dukungan manajemen, maupun program penyiaran publik.

Program dukungan manajemen turun dari Rp887,9 miliar menjadi Rp865,4 miliar pada tahun 2023. Sedangkan program penyiaran publik turun dari Rp453,9 miliar menjadi Rp127,6 miliar tahun 2023. Kedua program tersebut turun masing-masing sebesar minus 3% dan 72%.

Tabel 2. Pagu Indikatif LPP RRI (miliar rupiah)

Program	Pagu Indikatif 2022	APBN 2022	Pagu Indikatif 2023	Perubahan (%)
LPP RRI	1.041,9	1.341,8	993,0	-26%
Program Dukungan Manajemen	911,7	887,9	865,4	-3%
Program Penyiaran Publik	130,2	453,9	127,6	-72%

Sumber: KEM-PPKF 2023, KEM-PPKF 2022, APBN 2022, diolah.

Pagu indikatif untuk belanja pegawai sebesar Rp546,6 miliar (55,05%), belanja barang Rp344,9 miliar (34,74%) dan belanja modal sebesar Rp101,4 miliar (10,21%). Dari sisi belanja barang, 67,1% digunakan untuk belanja barang operasional atau sebesar Rp231,5 miliar. Sedangkan untuk belanja barang non operasional 32,9% atau sebesar Rp113,4 miliar.

Dari sisi belanja modal, 53,7% dibelanjakan untuk infrastruktur modal perkantoran atau sebesar Rp54,5 miliar dan

belanja modal infrastruktur teknik sebesar 46,3% atau Rp46,9 miliar.

RKP LPP RRI dijabarkan dalam 7 program prioritas nasional (PN) dimana: 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, 3) meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan pangan dan perubahan iklim serta 7) meningkatkan stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 PN tersebut, program kerja LPP RRI *inline* dengan PN 3 berupa pemanfaatan teknologi dan informasi melalui siaran dokumenter dialokasikan anggaran sebesar Rp1,6 miliar. Sedangkan program pengembangan infrastruktur penyiaran untuk 23 lokasi *inline* dengan PN 5 dialokasikan anggaran sebesar Rp16,1 miliar. Program penguatan program mitigasi bencana terpadu melalui siaran tanggap bencana (kentongan) sesuai dengan PN 6 dialokasikan anggaran sebesar Rp5,9 miliar. Program konten siaran dalam sembilan bahasa asing sesuai dengan PN 7 dialokasikan anggaran sebesar Rp1,6 miliar. Program siaran khusus UMKM di 69 stasiun RRI di seluruh Indonesia sesuai dengan PN 1.

Alokasi anggaran LPP RRI pada 2023 digunakan untuk beberapa belanja prioritas diantaranya:

- Revitalisasi peralatan teknik, pemancar yang sudah berusia di atas 20 tahun, peralatan radio dan sarana pendukung.
- Pengembangan *solar cell* untuk area 3T dan area yang belum terjangkau jaringan listrik.
- Pembangunan gedung RRI di Palu dan Banten
- Optimalisasi gedung penunjang siaran Medan Merdeka Barat dan MBC di Cimanggis dimana masih mengalami kekurangan anggaran penyelesaian pengembangan gedung penunjang sebesar Rp87,7 miliar.
- Selain itu, masih terjadi kekurangan anggaran penyelesaian pembangunan gedung B MPBC di Cimanggis sebesar Rp75,8 miliar.

Komisi II

POLITIK DAN KEAMANAN

Tinjauan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II pada KEM-PPKF 2023: Kemenpan RB, LAN dan BKN

HIGHLIGHT

- Pagu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 4,6% dari alokasi tahun sebelumnya.
- KemenpanRB akan meneruskan program reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang andal dan berkelas dunia
- Pagu indikatif Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2023 mengalami penurunan pagu sebesar 2,8% dari alokasi tahun sebelumnya. Alokasi anggaran LAN tahun 2022 sebesar Rp317 miliar, menurun menjadi Rp308 pada pagu indikatif tahun 2023.
- BKN pada tahun 2023 mengalami peningkatan pagu sebesar 1% dari alokasi tahun sebelumnya. Alokasi anggaran BKN tahun 2022 sebesar Rp579,8 miliar, menurun menjadi Rp585,4 miliar pada pagu indikatif tahun 2023.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: · Rendy Alvaro · Riza Aditya Syafri · Nova Aulia Bela

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pagu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 4,6% dari alokasi tahun sebelumnya. Alokasi anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 sebesar Rp295,3 miliar, turun menjadi Rp281,8 miliar pada pagu indikatif tahun 2023. Penurunan terdalam terjadi pada program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu turun sebesar 16,1%. Sedangkan program dukungan manajemen juga turun sebesar 0,4% dibanding APBN tahun 2022.

Tabel 1. Perbandingan Pagu Indikatif 2023, APBN 2022, Pagu Indikatif 2022 per Program (dalam miliar rupiah)

	Pagu Indikatif 2022	APBN 2022	Pagu Indikatif 2023	% perubahan dari 2022-2023
KEMENPAN RB	295,3	295,3	281,8	-4,6%
Program Dukungan Manajemen	213,2	215,9	215,1	-0,4%
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	82,2	79,5	66,7	-16,1%

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022, diolah.

Isu Strategis KemenpanRB

KemenpanRB akan meneruskan program reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang andal dan berkelas dunia. Beberapa hal yang ditekankan dalam program reformasi birokrasi diantaranya:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik;
- Mendorong penerapan pola kerja baru bagi ASN dengan penerapan *Flexible Working Arrangement* (FWA) maupun *Flexible Working Space* (FWS) pada pemerintahan;
- Perbaikan dan penyempurnaan dalam implementasi sistem merit bagi ASN;
- Reformasi sistem pensiun bagi ASN.

Lembaga Administrasi Negara

Pagu indikatif Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2023 mengalami penurunan pagu sebesar 2,8% dari alokasi tahun sebelumnya. Alokasi anggaran LAN tahun 2022 sebesar Rp317 miliar, menurun menjadi Rp308 pada pagu indikatif tahun 2023. Program dukungan manajemen dan program kebijakan, pembinaan profesi dan tata kelola ASN sama-sama mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 3% dan 2,1% dari alokasi anggaran tahun 2022.

Tabel 2. Perbandingan Pagu Indikatif 2023, APBN 2022, Pagu Indikatif 2022 per Program (dalam miliar rupiah)

	Pagu Indikatif 2022	APBN 2022	Pagu Indikatif 2023	% perubahan dari 2022-2023
LAN	316,9	317,0	308,0	-2,8%
Program Dukungan Manajemen	254,1	253,6	245,9	-3,0%
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	62,8	63,4	62,1	-2,1%

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022, diolah.

Isu Strategis LAN:

- Kebijakan strategis LAN masih akan berfokus pada penguatan dukungan dalam memberikan pembelajaran bagi pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM ASN, guna mencapai *World Class Government*.
- LAN masih akan terus fokus dalam mengembangkan dan menyempurnakan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), dengan mendorong optimalisasi penggunaan ICT.
- LAN masih akan terus mengembangkan sistem digital untuk memberikan pembelajaran secara efektif bagi pengembangan ASN. Harapannya, pelatihan yang selama ini dominan berbentuk klasikal, akan lebih fleksibel, namun tetap berjalan secara efektif.

Badan Kepegawaian Negara

Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2023 mengalami peningkatan pagu sebesar 1% dari alokasi tahun sebelumnya. Alokasi anggaran BKN tahun 2022 sebesar Rp579,8 miliar, meningkat menjadi Rp585,4 miliar pada pagu indikatif tahun 2023. Program kebijakan, pembinaan profesi dan tata kelola ASN mengalami penurunan sebesar 13,65% sedangkan Program dukungan manajemen mengalami peningkatan sebesar 3% dari alokasi anggaran tahun 2022.

Tabel 3. Perbandingan Pagu Indikatif 2023, APBN 2022, Pagu Indikatif 2022 per Program (dalam miliar rupiah)

	Pagu Indikatif 2022	APBN 2022	Pagu Indikatif 2023	% perubahan dari 2022-2023
BKN	579,2	579,8	585,4	1,0%
Program Dukungan Manajemen	506,8	509,4	524,6	3,0%
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	72,4	70,4	60,8	-13,6%

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022, diolah.

Isu Strategis BKN:

BKN akan meneruskan program sesuai tugas dan fungsinya dengan juga akan menjalankan enam strategi transformasi ASN Pemerintah pada tahun 2023 yaitu:

- Penguatan budaya kerja dan *employee branding* di mana budaya kerja atau *core value* ASN sekarang sama di semua K/L, baik di pusat maupun daerah;
- Percepatan peningkatan kapasitas ASN melalui akselerasi pengetahuan secara berkesinambungan;
- Pembentukan ASN yang tangguh melalui peningkatan kinerja dan perbaikan sistem penghargaan untuk ASN;
- Pengembangan talenta dan karier melalui pembentukan *talent committee* dan *talent tools* yang bertujuan untuk membangun *leadership* dan meningkatkan keterampilan teknis para ASN;
- Percepatan transformasi digital dengan menyiapkan super apps sebagai digital platform yang saling terhubung untuk ASN;
- penyesuaian atau perancangan jabatan yang bisa mendukung organisasi untuk bisa lebih fleksibel.
- Isu khusus yang mungkin masih dianggap menjadi fokus tahun 2023 yaitu masih adanya kualitas SDM ASN yang belum merata, perlunya memperkuat mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* untuk mendorong kinerja ASN yang berintegritas.

Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023

HIGHLIGHT

- Pagu Indikatif Kemenkumham TA 2023 adalah sebesar Rp18,49 triliun, meningkat sebesar 5,9% dibandingkan APBN TA 2022.
- Kenaikan anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung kebijakan di tahun 2023 khususnya yang terkait dengan peningkatan PNPB Kemenkumham dan perbaikan kualitas pelayanan lapas/rutan.
- Pagu Indikatif Kejaksaan RI TA 2023 adalah sebesar Rp9,6 triliun, menurun sebesar 4,7% dibandingkan APBN TA 2022.
- Penurunan anggaran tersebut diharapkan tidak berdampak negatif terhadap kinerja Kejaksaan RI dalam mendukung reformasi birokrasi maupun dalam melanjutkan *restorative justice* sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* di lapas/rutan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) TA 2023 adalah sebesar Rp18,49 triliun, meningkat sebesar 5,9% dibandingkan APBN TA 2022. Kenaikan ini diharapkan dapat mendukung kebijakan di tahun 2023 serta perlu juga memperhatikan dukungan Kemenkumham dalam mengatasi atau mengurangi *overcrowded* lapas/rutan yang selalu menjadi permasalahan beberapa tahun terakhir ini. Anggaran tersebut dialokasikan kepada beberapa program sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 1. Pagu Indikatif Kemenkumham (dalam miliar rupiah)

K/L	KEMPPKF 2022	APBN 2022	KEMPPKF 2023	% Perubahan dari 2022-2023
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17.021,7	17.463,5	18.487,3	5,9%
a. Program Dukungan Manajemen	12.484,1	12.484,1	13.783,3	10,4%
b. Program Pembentukan Regulasi	29,9	36,1	38,4	6,4%
c. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4.490,6	4.646,2	4.647,5	0,0%
d. Program Pemajuan dan Penegakan HAM	17,0	17,0	18,1	6,5%

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022, diolah.

Isu Strategis Pada Kemenkumham

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) utamanya berasal dari tiga unit yakni Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kinerja PNPB Kemenkumham periode 2017-2021 menunjukkan rata-rata pertumbuhan 2,36 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 (23,91 %) dan terendah tahun 2020 (-33,45 %) akibat pandemi Covid-19. Realisasi PNPB Kemenkumham tahun 2022 hingga triwulan I-2022 mencapai Rp0,92 triliun.

Kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2023, antara lain:

1. optimalisasi PNPB melalui perubahan jenis dan tarif atas jenis PNPB;
2. optimalisasi layanan *visa on arrival* bagi wisatawan mancanegara, penyediaan paspor elektronik, dan penjamin keimigrasian;
3. pengembangan layanan berbasis TIK melalui penerapan layanan *online* dan perbaikan sarana dan prasarana teknologi;
4. optimalisasi Layanan *Apostille* pada Kantor Wilayah Kemenkumham serta Implementasi Sistem e-APP di Indonesia;
5. perluasan kerja sama penggunaan data antar K/L;
6. peningkatan kemudahan pembayaran PNPB;
7. persetujuan Otomatis Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (POP HKI) terkait layanan bersifat non-substantif dan sertifikasi ISO 9001 untuk paten, merek, dan desain industri;

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Ratna Christianingrum · Tio Riyono · Leo Iskandar

8. peluncuran layanan klinik kekayaan intelektual/*mobile Intellectual Property (IP Clinic)* dan program *IP market place*.

Selain itu, Kemenkumham perlu memprioritaskan perbaikan kualitas pelayanan lapas/rutan. Karena faktanya bahwa:

1. Masih terjadi *overcrowded*, data Mei 2022 menunjukkan hingga 208% dari kapasitasnya.

2. Kualitas non makanan menurun.

Data menunjukkan bahwa biaya non makanan periode tahun 2012-2021 hanya meningkat 74,48%. Angka tersebut di bawah peningkatan biaya non makanan secara umum dalam periode yang sama sebesar 83,47% (BPS, 2021).

3. Belum cukup pemenuhan kebutuhan biologis penghuni lapas/rutan yang sudah menikah.

Pareke (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyimpangan seks yang terjadi di lembaga permasyarakatan sudah dalam tahap yang sangat memprihatinkan. Salah satu upaya mengatasi hal tersebut ialah dengan kebijakan *conjugal visit*. Sampai saat ini, Indonesia baru memiliki 3 bilik asmara di lapas Ciangir, Kendal, dan Nusa Kambangan.

KEJAKSAAN RI

Di tahun anggaran 2023, pagu indikatif Kejaksaan RI menurun sebesar 4,7% dibandingkan APBN TA 2022. Sebelumnya, pada APBN TA 2022, Kejaksaan RI berhasil memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp3 triliun. Hal tersebut karena Kejaksaan RI memiliki struktur organisasi baru Jaksa Agung Muda Pidana Militer sesuai dengan Perpres 15 Tahun 2021.

Tabel 2. Pagu Indikatif Kejaksaan RI (dalam miliar rupiah)

K/L	KEMPPKF 2022	APBN 2022	KEMPPKF 2023	% Perubahan dari 2022-2023
KEJAKSAAN RI	6.864,0	10.110,0	9.632,2	-4,7%
a. Program Dukungan Manajemen	6.391,4	9.490,2	9.110,9	-4,0%
b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	472,6	619,8	521,2	-15,9%

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022, diolah.

Isu Strategis Pada Kejaksaan RI

1. Kejaksaan RI dalam Mendukung Reformasi Birokrasi

Dalam KEM & PPKF 2023 dijelaskan bahwa reformasi birokrasi pada tahap ketiga (2020-2024) bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendorong percepatan pembangunan nasional. Sehubungan dengan tujuan tersebut, Kejaksaan RI dinilai telah berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Menurut Indikator (2022), kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI sangat tinggi, yaitu berada di urutan ke-4 setelah TNI, Presiden, dan Polri. Jika dilihat dari kinerja, ICW (2022) mengungkapkan bahwa sepanjang 2021, kinerja Kejaksaan RI dalam menangani kasus korupsi mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan Kepolisian dan KPK. Secara internal juga Kejaksaan RI menunjukkan kinerja sangat baik dibuktikan dengan capaian kinerja sasaran strategis pada 2021. Artinya, prestasi Kejaksaan RI tersebut tentu akan mendukung reformasi birokrasi. Untuk itu, prestasi Kejaksaan RI tersebut harus dijaga dan ditingkatkan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya.

2. Melanjutkan *Restorative Justice*

Semenjak Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan RI telah menghentikan lebih dari 823 penuntutan perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan restoratif. Pelaksanaan *restorative justice* sudah semakin diperkuat dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal tersebut akan sangat membantu memberikan rasa keadilan pada aspek hukum serta dapat meringankan *overcrowded* pada lapas/rutan. Namun sangat disayangkan apabila tahun 2023 pagu anggaran Kejaksaan RI menurun sebesar 4,7%. Harapannya agar Kejaksaan RI dapat konsisten melanjutkan capaian terbaiknya yang telah diraih selama ini.